

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Harian Kas Daerah	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat 3 d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
2	Ranperda APBD	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat 3 e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
3	Ranperda APBDP	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat 3 e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
4	Data Wajib Pajak dan Informasi lain yang diberikan Wajib Pajak	- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan Pasal 17 h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi - Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 103 ayat 1.	Tindakan kriminal mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5	Biodata ASN di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Daftar Nilai Kinerja ASN di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan	- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik - Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
8	Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
9	Memorandum/Nota Dinas, Disposisi, dan Surat-surat antar Perangkat Daerah atau Intra Perangkat Daerah yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	Tidak Terbatas

Painan, 01 Agustus 2022
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE, AK, M.Ec. Dev

NIP. 19780528 200501 2 004